

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT, PENERAPAN ANALISIS KREDIT, DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI TENTANG MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN PRINSIP 5C

Stevanie Dwi Natasa¹

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
Corresponding email: stevaniedwinatasa21@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit pada bank daerah, penerapan prinsip analisis kredit, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) melalui basis data Google Scholar dan PubMed menggunakan kata kunci seperti “credit lending procedure”, “regional development bank”, dan “credit risk management”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada bank daerah meliputi tahapan pengajuan permohonan, analisis kredit dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), verifikasi dokumen dan survei lapangan, pengambilan keputusan, pencairan dana, serta monitoring pasca pencairan. Kendala yang sering ditemui mencakup kompleksitas administrasi, keterbatasan kualitas debitur, masalah jaminan, kondisi ekonomi eksternal, keterbatasan teknologi, dan komunikasi internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberian kredit sangat bergantung pada penerapan prosedur yang sistematis, analisis kredit yang tepat, serta kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengelola kendala. Implementasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: prosedur kredit, bank daerah, analisis kredit, 5C, kendala pemberian kredit, manajemen risiko

Abstract: This study aims to analyze the credit granting procedures at regional development banks, the application of credit analysis principles, and the challenges encountered during the process. The research employs a literature study using the Systematic Literature Review (SLR) approach through Google Scholar and PubMed databases with keywords such as “credit lending procedure”, “regional development bank”, and “credit risk management”. The results indicate that the credit granting procedure in regional banks includes stages of credit application, credit analysis based on the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), document verification and field survey, credit decision-making, fund disbursement, and post-disbursement monitoring. Common challenges include administrative complexity, limited debtor quality, collateral issues, external economic conditions, technological limitations, and internal communication problems. The study concludes that successful credit granting relies heavily on systematic procedures, accurate credit analysis, and the bank's ability to identify and manage obstacles. Effective implementation can improve credit distribution quality and support sustainable regional economic growth.

Keywords: credit procedure, regional bank, credit analysis, 5C, credit challenges, risk management

PENDAHULUAN

Analisis proses pemberian kredit bank daerah sangat penting untuk mempertahankan operasi perbankan dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Melalui penyediaan kredit kepada masyarakat, usaha kecil dan menengah, serta sektor produktif lainnya, bank daerah, juga dikenal sebagai bank pembangunan daerah (BPD), memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya (Fadila & Samsiah, 2023). Sistem pemberian kredit harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank. Tujuan analisis prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama proses penyaluran dana kepada pelanggan serta untuk memastikan bahwa langkah-langkah pemberian kredit telah dilakukan dengan benar (Yudianto, 2021).

Bank lokal memberikan kredit setelah calon debitur mengajukan permohonan. Pada tahap ini, calon pelanggan harus melengkapi berbagai dokumen untuk mengajukan kredit, termasuk identitas diri, laporan keuangan perusahaan, jaminan atau agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan jenis kredit yang diminta (F. F. D. Pasalbessy, 2021). Bank lokal biasanya menawarkan berbagai jenis kredit, termasuk kredit konsumtif, investasi, modal kerja, dan kredit usaha rakyat. Proses dan peraturan yang berlaku untuk setiap jenis

kredit berbeda, tetapi secara umum, mereka tetap mengikuti protokol operasi yang telah ditetapkan oleh bank. Bank menggunakan tahap pengajuan ini untuk menemukan kebutuhan pelanggan dan menilai kelayakan awal permohonan kredit (Putri & Werastuti, 2023).

Setelah proses pengajuan selesai, proses analisis kredit dilakukan oleh analis kredit. Pada titik ini, bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap kredibilitas calon debitur menggunakan konsep 5C, yaitu karakter, kemampuan, modal, jaminannya, dan kondisi ekonomi (Farina & Winta, 2020). aspek karakter berkaitan dengan kepribadian dan reputasi calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangan. Aspek kapasitas menilai kemampuan debitur dalam mengelola bisnis dan membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian. Sementara collateral merujuk pada jaminan yang diberikan kepada bank sebagai bentuk perlindungan terhadap kredit yang diberikan, aspek modal berkaitan dengan kondisi permodalan usaha yang dimiliki oleh debitur. Condition of economy berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha debitur. Condition of economy berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha debitur. Melalui analisis 5C ini, pihak bank dapat menentukan apakah permohonan kredit layak untuk disetujui atau tidak (Saraswati & Jaurino, 2024).

Proses verifikasi dan survei lapangan adalah langkah selanjutnya dalam proses pemberian kredit. Pada tahap ini, bank biasanya mengunjungi langsung tempat tinggal atau bisnis calon debitur untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam permohonan kredit adalah benar (Komaria et al., 2023). Proses survei sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data atau informasi yang salah. Survei lapangan memberi bank kesempatan untuk menilai kondisi bisnis debitur, peluang pertumbuhan, dan risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Manajemen bank kemudian mempertimbangkan hasil survei dan proses verifikasi saat membuat keputusan kredit.

Setelah analisis dan verifikasi selesai, langkah berikutnya adalah keputusan kredit. Dalam kebanyakan kasus, keputusan ini dibuat melalui rapat komite kredit atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan batas plafon kredit yang diajukan. Dalam langkah ini, bank akan menentukan apakah permohonan kredit dapat disetujui, ditunda, atau ditolak (Nurdin et al., 2019). Jika disetujui, bank akan menentukan jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan perjanjian kredit. Agar bank tidak mengalami kerugian, keputusan kredit ini harus dibuat berdasarkan analisis yang objektif yang mempertimbangkan berbagai faktor risiko.

Setelah kedua belah pihak menyetujui semua persyaratan administrasi dan perjanjian kredit, tahap berikutnya adalah pencairan kredit. Pada tahap ini, debitur akan menandatangani perjanjian kredit yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jadwal pembayaran angsuran, suku bunga, dan sanksi jika pembayaran terlambat. Bank akan mencairkan dana kredit sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati setelah proses penandatanganan perjanjian selesai. Tergantung pada jenis kredit dan kebutuhan debitur, pencairan kredit dapat dilakukan secara instan atau bertahap (Rosna et al., 2022).

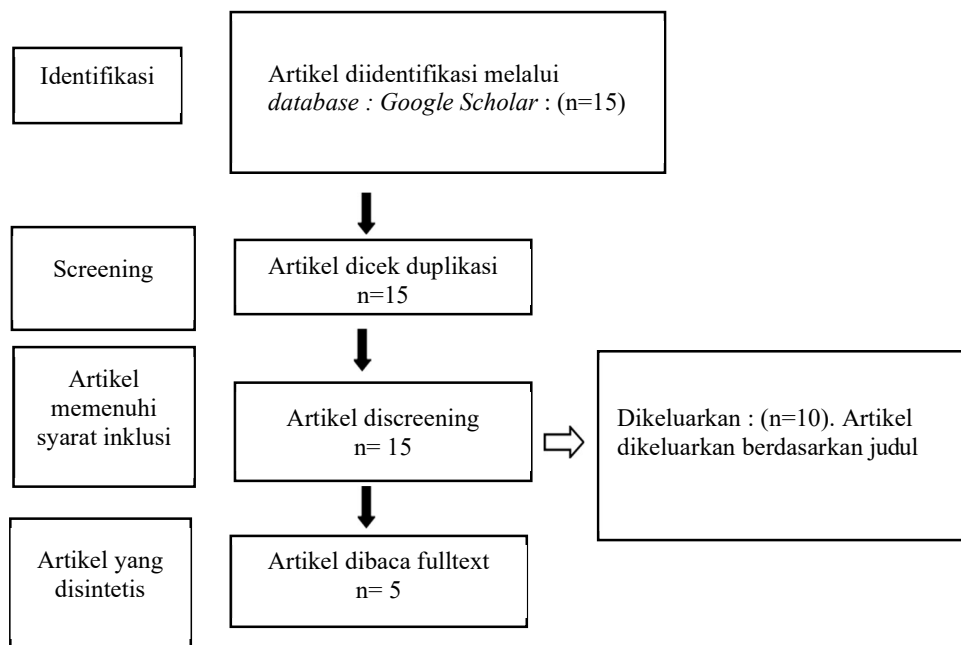
Selain proses pemberian kredit, bank daerah juga melakukan tahap pengawasan atau monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana kredit digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati serta untuk memantau kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat membantu pihak bank dalam mendeteksi secara dini apabila terdapat potensi kredit bermasalah (Anjeli & Fernos, 2021). Apabila ditemukan indikasi kesulitan pembayaran, bank dapat melakukan berbagai langkah seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau pendekatan kepada debitur untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak (Mezli Nofeliza, 2022).

METODE

Dalam penelitian tentang analisis prosedur pemberian kredit pada bank daerah, Systematic Literature Review (SLR) digunakan. Penelitian ini mengidentifikasi, meninjau, dan mensintesis berbagai temuan penelitian yang relevan secara sistematis. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang luas tentang prosedur pemberian kredit dalam lembaga perbankan daerah. Untuk melakukan pencarian literatur, Google Scholar dan PubMed digunakan, dua basis data ilmiah yang terpercaya yang menyediakan berbagai artikel penelitian. Beberapa kata kunci yang relevan dengan topik penelitian digunakan untuk melakukan pencarian jurnal. Kata-kata ini termasuk "prosedur pinjaman kredit", "analisis kredit bank", "pembangunan bank regional", pengelolaan risiko kredit, "proses persetujuan kredit", dan "prosedur kredit bank".

PEMBAHASAN

Pedoman Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) digunakan dalam proses seleksi artikel, yang terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap pertama, seseorang melakukan pencarian artikel, dan sebanyak 15 artikel ditemukan dalam periode tahun 2020–2025. Kemudian, artikel-artikel ini dievaluasi untuk tahap screening, dan 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, setiap artikel diperiksa untuk keandalan dan kualitasnya. Ini mencerminkan proses yang ketat dan sistematis untuk memilih artikel sesuai dengan panduan PRISMA.



Bagan 1. Diagram PRISMA

Peneliti menjalankan proses pengambilan keputusan terkait artikel yang ditemukan berkenaan dengan isu penelitian ini, serta melakukan identifikasi dari setiap artikel yang terdapat dalam setiap database yang diakses.

Tabel 1. Analisa Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Daerah

Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
--------------------	--------	-------

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo (Farina & Winta, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo (Studi Kasus Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo).	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
Analisis Perbandingan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Bank Bri Konvensional Dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Samarinda (Farina & Winta, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemberian kredit secara konvensional pada Bank BRI Konvensional Samarinda dan pembiayaan murabahah syariah pada Bank BRI Syariah Samarinda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis perbandingan sistem dan prosedur pemberian kredit pada Bank BRI Konvensional dan Bank BRI Syariah Samarinda menunjukkan bahwa terdapat dua perbedaan yang pertama fungsi Customer Service di Bank BRI Konvensional
Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya (Farina & Winta, 2020)	Dalam penelitian ini akan dipelajari bagaimana pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya	Sistem prosedur pemberian kredit yang digunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Burnai di Kecamatan Lempuing Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan teori prosedur pemberian kredit, sesuai dengan analisis sistem
Peran Analisis Kredit Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Cahaya Khatulistiwa Sejahtera Peran Analisis Kredit Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Cahaya Khatulistiwa Sejahtera (Farina & Winta, 2020)	Penelitian ini bertujuan menganalisis peran analisis kredit dalam proses pemberian kredit di PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera dan dampak perubahan dalam NonPerforming Loans (NPL) terhadap kinerja bank.	Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar bank menerapkan sistem pengarsipan digital yang terstruktur dan menyelenggarakan program pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang KCU Kalimalang (Farina & Winta, 2020)	Tujuan riset adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan penerapan sistem pengendalian internal PT Bank Central Asia Tbk KCU Kalimalang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan standar pemberian kredit. Implementasi sistem pengendalian internal pada pemberian kredit pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Kalimalang

(Farina & Winta, 2020)
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Bank daerah mendapat kredit melalui proses yang sangat penting dalam operasi mereka, yang bertujuan untuk memberikan dana kepada masyarakat secara aman, terawasi, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk tujuan konsumtif dan produktif seperti investasi, modal usaha, dan pengembangan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan bank, proses pemberian kredit harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan (Budiana & Dewi, 2022).

Bank lokal memberikan kredit setelah calon debitur mengajukan permohonan. Pada tahap ini, calon pelanggan melengkapi berbagai formulir persyaratan untuk mengajukan kredit kepada bank (Tumiwa et al., 2019). Identitas diri, seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan bisnis, laporan keuangan perusahaan, serta dokumen agunan atau jaminan yang akan digunakan sebagai penjamin kredit, biasanya termasuk dalam dokumen tersebut. Selain itu, calon debitur harus mengisi formulir permohonan kredit dengan informasi tentang tujuan mendapatkan kredit, jumlah dana yang diperlukan, dan jangka waktu pengembalian pinjaman. Bank dapat memanfaatkan tahap ini untuk mengetahui profil calon debitur dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan (Novitasari, 2021).

Setelah permohonan kredit diajukan, tahap selanjutnya adalah proses analisis kredit yang dilakukan oleh pihak analis kredit atau bagian kredit bank. Pada tahap ini, bank melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur dengan menggunakan prinsip analisis kredit yang dikenal dengan konsep 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* (Shidarta, 2021). Aspek *character* berkaitan dengan integritas, reputasi, dan kejujuran calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pihak bank biasanya melakukan pengecekan riwayat kredit calon debitur melalui sistem informasi debitur atau lembaga informasi keuangan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki catatan kredit yang baik (Paramita & Muktiadji, 2022). Aspek *capacity* berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengelola usaha dan membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat pendapatan, arus kas usaha, serta stabilitas pekerjaan atau usaha yang dimiliki oleh calon debitur.

Aspek *capital* juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis kredit. *Capital* mengacu pada kondisi permodalan yang dimiliki oleh calon debitur, terutama bagi mereka yang mengajukan kredit usaha. Bank akan menilai apakah calon debitur memiliki modal sendiri yang cukup untuk menjalankan usahanya sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dana pinjaman dari bank (Warsito & Sudarwanto, 2020). Selanjutnya adalah aspek *collateral* yang berkaitan dengan jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai bentuk pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit, bank memiliki hak untuk menggunakan agunan tersebut sebagai bentuk pelunasan kewajiban debitur. Aspek terakhir adalah *condition of economy*, yaitu kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam menjalankan usaha dan membayar pinjaman, seperti kondisi pasar, tingkat inflasi, serta situasi ekonomi daerah (Hardiana et al., 2024).

Tahapan berikutnya dalam prosedur pemberian kredit adalah proses verifikasi data dan survei lapangan. Pada tahap ini, petugas bank biasanya melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal calon debitur untuk memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan dalam dokumen permohonan kredit (Mongkito et al., 2021). Survei lapangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha, lingkungan bisnis, serta potensi perkembangan usaha debitur. Verifikasi juga dilakukan terhadap keabsahan dokumen agunan yang diberikan oleh calon debitur. Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data atau pemberian kredit kepada pihak yang tidak layak menerima pembiayaan (Lisa, 2017).

Setelah proses analisis dan verifikasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan kredit. Keputusan ini biasanya dilakukan oleh komite kredit atau pejabat bank yang memiliki kewenangan sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan. Pihak bank akan mempertimbangkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan apakah permohonan kredit dapat disetujui, ditolak, atau ditunda. Apabila permohonan kredit disetujui, bank akan menetapkan jumlah kredit yang diberikan, tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta syarat dan ketentuan lainnya yang harus dipatuhi oleh debitur (Fauziah & Albetris, 2021).

Tahapan selanjutnya adalah proses penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dan debitur. Perjanjian ini merupakan dokumen resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai pembayaran angsuran, suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta sanksi apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka bank akan melakukan proses pencairan dana kredit kepada debitur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pencairan dana dapat dilakukan secara sekaligus maupun secara bertahap tergantung pada jenis kredit dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan (Saryanti & Sudrajat, 2020).

Selain tahapan pemberian kredit, bank daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana kredit digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati serta untuk memantau kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran. Melalui pengawasan yang baik, pihak bank dapat mendeteksi secara dini apabila terdapat potensi kredit bermasalah dan dapat segera mengambil langkah-langkah penanganan seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau pendekatan kepada debitur untuk mencari solusi yang terbaik (Fajarningtyas et al., 2020).

Penerapan prinsip analisis kredit dalam proses pemberian kredit pada bank daerah merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas penyaluran kredit sekaligus mengurangi risiko kredit bermasalah. Analisis kredit bertujuan untuk menilai kelayakan debitur, memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan, dan meminimalkan kemungkinan gagal bayar (Khairunisa, 2024). Bank daerah, sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap pembangunan wilayah, menerapkan prosedur analisis kredit secara sistematis melalui berbagai prinsip dan metodologi yang dikenal luas di industri perbankan. Proses ini tidak hanya berfokus pada kemampuan calon debitur dalam membayar kredit, tetapi juga mempertimbangkan reputasi, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha.

Prinsip utama dalam analisis kredit di bank daerah dapat dijelaskan melalui konsep 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Aspek Character berkaitan dengan integritas, moral, dan reputasi calon debitur dalam memenuhi kewajiban keuangan. Bank daerah melakukan penilaian terhadap riwayat kredit dan rekam jejak finansial calon debitur, termasuk apakah debitur memiliki catatan kredit buruk atau pernah mengalami kredit macet sebelumnya (Hariesti, 2019). Penilaian ini biasanya dilakukan melalui pengecekan sistem informasi debitur atau lembaga pemeringkat kredit, sehingga bank dapat menilai apakah calon debitur memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban finansialnya. Penerapan aspek Character penting karena risiko utama kegagalan kredit sering kali muncul akibat ketidakjujuran atau kurangnya komitmen dari pihak debitur.

Aspek Capacity merupakan prinsip yang menilai kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas atau pendapatan yang cukup untuk membayar kredit. Bank daerah menganalisis laporan keuangan debitur, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan proyeksi arus kas usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penilaian

kapasitas ini juga melibatkan analisis terhadap stabilitas usaha, strategi bisnis, dan potensi pasar yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan menilai Capacity, bank dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga dapat dilunasi tepat waktu, sehingga menekan risiko gagal bayar (Muftiyah & Akhiruddin, 2025).

Aspek Capital atau modal yang dimiliki debitur juga menjadi faktor penting dalam analisis kredit. Modal menunjukkan seberapa besar kontribusi pribadi debitur dalam membiayai usahanya dan seberapa besar risiko yang ditanggung oleh bank. Debitur dengan modal kuat menunjukkan kemampuan finansial yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada dana pinjaman. Dalam praktiknya, bank daerah menilai kecukupan modal melalui analisis ekuitas atau aset yang dimiliki debitur. Modal yang memadai tidak hanya meningkatkan kredibilitas debitur, tetapi juga menjadi indikator keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang (Fibriyanti & Wijaya, 2018).

Aspek Collateral atau jaminan diberikan sebagai pengamanan kredit. Bank daerah memerlukan jaminan berupa aset yang dapat dicairkan atau dijual apabila debitur gagal membayar kredit. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, bangunan, kendaraan, atau aset produktif lainnya (Fradana et al., 2024). Penerapan prinsip Collateral memastikan bahwa bank memiliki hak hukum terhadap aset debitur jika terjadi gagal bayar, sehingga risiko kerugian finansial dapat diminimalkan. Penilaian terhadap nilai jaminan dilakukan secara hati-hati, termasuk pengecekan legalitas dokumen, kepemilikan sah, dan estimasi nilai pasar aset. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan jaminan dapat dieksekusi bila diperlukan (Utami et al., 2022).

Bank daerah melihat faktor-faktor seperti tren industri, persaingan pasar, kondisi ekonomi makro, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi industri tertentu. Misalnya, biaya produksi dan profitabilitas bisnis dapat dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga komoditas. Jika risiko eksternal terlalu tinggi, bank dapat mengubah jumlah kredit, jangka waktu pinjaman, atau bahkan menunda pemberian kredit dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Prinsip ini menunjukkan bahwa analisis kredit tidak hanya bersifat internal tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kesuksesan kredit debitur (Rosna et al., 2022).

Di bank daerah, penerapan prinsip analisis kredit biasanya dilakukan secara berlapis. Pertama, analisis kredit memeriksa dokumen calon debitur untuk memastikan bahwa informasinya valid. Selanjutnya, survei lapangan dilakukan untuk memverifikasi informasi, mengevaluasi kondisi bisnis, dan memastikan bahwa kredit digunakan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, hasil analisis disampaikan kepada komite kredit atau pejabat berwenang untuk pengambilan keputusan. Seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan protokol operasional yang ketat, yang mencakup tenggat waktu untuk analisis, dokumentasi, dan evaluasi risiko kredit (Mezli Nofeliza, 2022).

Prinsip kehati-hatian bank daerah juga termasuk penilaian risiko secara kuantitatif dan kualitatif, penggunaan metrik finansial seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, dan penerapan sistem pengawasan pasca pencairan kredit. Secara teratur, pengawasan dilakukan untuk memastikan kredit digunakan sesuai tujuan dan debitur dapat memenuhi kewajibannya. Bank dapat merestrukturisasi kredit atau menyesuaikan jadwal pembayaran untuk menjaga kredibilitas jika terjadi risiko (Anjeli & Fernos, 2021).

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada bank daerah tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses penyaluran kredit serta kualitas portofolio kredit. Kendala-kendala ini muncul baik dari sisi internal bank maupun dari sisi eksternal debitur dan lingkungan ekonomi (Budiana & Dewi, 2022). Memahami kendala tersebut menjadi hal penting bagi bank daerah karena dapat membantu pihak manajemen dalam

merumuskan strategi mitigasi risiko, memperbaiki prosedur, dan meningkatkan efektivitas penyaluran kredit untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu kendala administratif dan prosedural, kendala terkait debitur, serta kendala lingkungan atau eksternal.

Kendala pertama yang sering dihadapi adalah terkait aspek administratif dan prosedural. Prosedur pemberian kredit di bank daerah umumnya melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari pengajuan permohonan, analisis kredit, verifikasi dokumen dan survei lapangan, pengambilan keputusan, pencairan dana, hingga monitoring pasca penyaluran (Tumiwa et al., 2019). Kompleksitas ini sering menyebabkan proses menjadi lambat dan memakan waktu yang cukup lama, terutama apabila dokumen yang diserahkan debitur tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian informasi. Proses verifikasi dokumen dan jaminan memerlukan ketelitian tinggi karena setiap kesalahan administrasi dapat berisiko menimbulkan kredit macet di kemudian hari. Kapasitas sumber daya manusia di bank daerah sering menjadi kendala karena jumlah petugas analisis kredit terbatas, sementara jumlah permohonan kredit cukup banyak, sehingga mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan potensi keterlambatan pengambilan keputusan kredit (Novitasari, 2021).

Banyak calon debitur, terutama dari kalangan UMKM, belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola administrasi keuangan dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit (Paramita & Muktiadji, 2022). Hal ini menyebabkan dokumen yang diserahkan sering tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan bank. Selain itu, debitur terkadang memiliki riwayat kredit yang kurang baik atau belum terbiasa dalam disiplin pembayaran angsuran, sehingga menambah risiko kredit bermasalah. Kemampuan debitur dalam menjalankan usaha juga menjadi faktor penting; jika usaha tidak stabil atau memiliki arus kas yang fluktuatif, risiko gagal bayar akan meningkat. Kendala ini menuntut bank untuk melakukan analisis dan pendampingan yang lebih intensif, tetapi keterbatasan tenaga analisis dan sumber daya lainnya sering menjadi hambatan dalam pelaksanaannya (Shidarta, 2021).

Jaminan atau agunan seringkali menjadi hambatan dalam proses pemberian kredit. Tidak semua calon debitur memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, terutama bagi individu dengan modal terbatas atau usaha mikro. Legalitas dan penilaian nilai jaminan sering menjadi masalah, seperti sertifikat tanah atau bangunan yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan bank. Proses penilaian dan verifikasi agunan yang membutuhkan banyak waktu dan keterampilan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan kredit. Bank menolak atau menyetujui permohonan kredit karena beberapa masalah (Warsito & Sudarwanto, 2020).

Selain kendala internal dan debitur, lingkungan eksternal juga memberikan tantangan tersendiri bagi bank daerah dalam menyalurkan kredit. Faktor ekonomi makro, seperti inflasi, fluktuasi harga komoditas, atau kondisi pasar yang tidak stabil, dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar angsuran. Misalnya, penurunan harga jual produk usaha debitur dapat menurunkan pendapatan dan arus kas usaha, sehingga berisiko menimbulkan kredit macet (Hardiana et al., 2024). Perubahan regulasi pemerintah terkait perbankan atau sektor usaha tertentu juga dapat memengaruhi prosedur pemberian kredit, misalnya penyesuaian batas suku bunga, ketentuan rasio kredit bermasalah, atau persyaratan agunan yang lebih ketat. Kondisi lingkungan eksternal ini memerlukan strategi manajemen risiko yang adaptif agar bank tetap dapat menyalurkan kredit secara aman dan berkelanjutan (Mongkito et al., 2021).

Faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi juga merupakan hambatan signifikan bagi proses pemberian kredit di bank daerah. Banyak bank lokal masih

menggunakan sistem administrasi dan pencatatan manual atau semi-digital. Ini meningkatkan kemungkinan kesalahan data dan mempersulit proses pengawasan kredit. Proses analisis, verifikasi, dan pengambilan keputusan juga dapat tertunda jika bergantung pada sistem manual. Selain itu, debitur yang memiliki keterbatasan dalam teknologi atau kemampuan digital mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan dokumen atau mendapatkan informasi kredit, yang dapat mengganggu proses (Lisa, 2017).

Proses pemberian kredit juga dapat dipengaruhi oleh masalah komunikasi internal dan budaya kerja bank. Bagian depan, analisis kredit, dan manajemen seringkali tidak bekerja sama dengan baik. Ini terutama berlaku dalam hal komunikasi informasi tentang kondisi debitur atau status permohonan kredit. Ketidakteraturan komunikasi ini dapat menyebabkan proses tertunda atau keputusan yang salah. Salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas penilaian kredit adalah kurangnya pelatihan petugas kredit tentang metode analisis kredit terbaru (Fauziah & Albetris, 2021).

Faktor sosial dan psikologis debitur juga dapat menjadi hambatan dalam proses pemberian kredit. Bank kesulitan menilai risiko kredit karena beberapa debitur cenderung tidak memberi tahu orang lain tentang kondisi bisnis mereka atau masalah keuangan mereka (Fajarningtyas et al., 2020). Keputusan kredit dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Ini terutama benar dalam kasus manajemen yang dipaksa oleh pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau kelompok usaha tertentu. Agar bank dapat beroperasi secara profesional, kebijakan yang jelas dan prinsip kehati-hatian yang konsisten diperlukan.

SIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi tentang proses pemberian kredit pada bank daerah, penerapan prinsip analisis kredit, dan tantangan yang dihadapi. Bank daerah menggunakan proses yang sistematis untuk memberikan kredit, mulai dari pengajuan permohonan, analisis kredit, verifikasi dokumen dan survei lapangan, pengambilan keputusan, pencairan dana, dan pengawasan pasca penyaluran. Setiap langkah sangat penting untuk memastikan debitur yang layak mendapatkan kredit dan mengurangi risiko gagal bayar.

Untuk menerapkan prinsip analisis kredit di bank daerah, konsep 5C Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy digunakan. Konsep ini digunakan untuk memeriksa kelayakan debitur dari berbagai aspek, termasuk kepribadian, kemampuan finansial, modal usaha, jaminan, dan kondisi ekonomi eksternal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank dapat membuat pilihan kredit yang tepat, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjeli, D., & Fernos, J. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan. *Jurnal Akuntansi*.
- Budiana, I. N., & Dewi, N. L. P. P. prami. (2022). Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022).
- F. F. D. Pasalbessy, V. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PHIDECTAMA BIAK. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>
- Fadila, R., & Samsiah, S. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Kantor Cabang Sudirman

- Pekanbaru. *Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Fajarningtyas, D. S., Isharijadi, I., & Styaningrum, F. (2020). ANALISIS PENGENDALIAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI KREDIT MACET PADA PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN. *Review of Accounting and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.52250/reas.v1i1.334>
- Farina, K., & Winta, W. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang KCU Kalimalang. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.292>
- Fauziah, F., & Albetris, A. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi dalam Pemberian Kredit Produktif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1579>
- Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, O. I. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN. *JURNAL AKUNTANSI*, 3(2). <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i2.162>
- Fradana, Y. A., Sandayanti, V., & Harkina, P. (2024). PENGARUH EMOTIONAL INTELLIGENCE DAN PRESTASI AKADEMIK TERHADAP KECENDERUNGAN CONDUCT DISORDER PADA REMAJA. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 6(2). <https://doi.org/10.33024/jpm.v6i2.10135>
- Hardiana, A., Gadzali, S. S., & Kartini, T. (2024). PROSEDUR PENYALURAN KREDIT PRA PURNA BHAKTI DI BAGIAN ACCOUNT OFFICER KONSUMER PADA BANK JABAR BANTEN KANTOR CABANG PEMBANTU PAGADEN. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v6i1.2045>
- Hariesti, N. G. (2019). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MULTI GUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SINGARAJA. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/vjra.v8i1.20756>
- Khairunisa, G. (2024). Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Buah Batu Bandung. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(4).
- Komaria, S., Oktariansyah, O., Emilda, E., & Verasari, V. (2023). Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1). <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13190>
- Lisa, K. (2017). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Produktif Dalam Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. *Issn*, 6(1).
- Mezli Nofeliza. (2022). PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI. *Gender and Development*, 120(1).
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Muftiyah, E. R., & Akhiruddin, A. (2025). Analisis Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1). <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1133>
- Novitasari, H. E. A. (2021). Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi

- Kencana di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17).
- Nuridin, S., Rafiqoh, & Labuda, D. I. (2019). Analisis Perbandingan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Bank Bri Konvensional Dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Samarinda. *Jurnal Eksis*, 15(2).
- Paramita, A., & Muktiadji, N. (2022). Tinjauan Atas Prosedur Kredit Modal Kerja Kepada Nasabah PERUMDA BPR Bank Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1498>
- Putri, P. M. S., & Werastuti, D. N. S. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. BPR Bank Buleleng 45. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3). <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50326>
- Rosna, R., Said, R., & Sumantri, S. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo. *Tangible Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.296>
- Saraswati, R., & Jaurino. (2024). PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA PERAN ANALIS KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi*, 4(1). <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i1.457>
- Saryanti, S., & Sudrajat, Y. (2020). Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Subang. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.759>
- Shidarta, A. C. (2021). PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG MOJOKERTO. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Tumiwa, R. J., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS KREDIT KONSTRUKSI (KMK-KONTRAKTOR) PT. BANK SULUTGO TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(9). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23439.19.9.2019>
- Utami, A. R., Sartika, D., & Permana, R. H. (2022). Pengaruh Emotional Intelligence terhadap Work-Life Balance pada Karyawan Perusahaan X Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 2.
- Warsito, B. R., & Sudarwanto, A. S. (2020). PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DI PERSEROAN DAERAH BPR BANK KLATEN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43003>
- Yudianto, A. (2021). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CANDI AGUNG AMUNTAL. *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 3(2). <https://doi.org/10.36658/ijan.3.2.86>